



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 4 August 2023, Revised: 6 September 2023, Publish: 7 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pendaftaran Tanah Untuk Keamanan Kepemilikan Hak Atas Tanah: Tinjauan Studi Literatur

Dinda Keumala¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: dinda.k@trisakti.ac.id

Corresponding Author: dinda.k@trisakti.ac.id

Abstract: Land registration is an activity carried out to obtain legal certainty and provide security of ownership of land rights. The problem in this research is what is the purpose of land registration, what is the cause of illegal occupation and control of land rights / land disputes and which countries are used as objects of research on land registration related to the security of ownership of land rights that have been carried out. This research uses a literature review. The results found that there is a close relationship between the objectives of land registration activities carried out can provide security of ownership of land rights and reduce the occurrence of land disputes, and the countries used as objects of research are mostly countries prone to land conflicts.

Keyword: Land Registration, Security of Ownership of Land Rights.

Abstrak: Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dan memberikan keamanan kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian ini apakah yang menjadi tujuan dilakukannya pendaftaran tanah, apakah yang menjadi penyebab terjadinya pendudukan dan penguasaan hak atas tanah secara liar/ sengketa tanah dan negara-negara mana yang dijadikan sebagai obyek penelitian tentang pendaftaran tanah yang terkait dengan keamanan kepemilikan hak atas tanah yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan tinjauan studi literatur. Hasil penelitian menemukan adanya keterkaitan erat tujuan dari kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dapat memberikan keamanan kepemilikan hak atas tanah dan mengurangi terjadinya sengketa pertanahan, serta negara-negara yang dijadikan obyek penelitian sebagian besar merupakan negara-negara yang rawan konflik pertanahan.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Keamanan Kepemilikan Hak atas Tanah.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan permukaan bumi yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Setiap negara mempunyai caranya masing-masing untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanahnya. Sistem administrasi pertanahan di masing-masing negara berbeda

menurut jenis dan prakteknya (Josip Krizanovic, Doris Pivac, Hrvoje Tomic and Sinisa Mastelic-Ivic, 2021). Upaya pemeliharaan sistem administrasi pertanahan dan data-data yang dimiliki sudah lama diketahui juga memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Kerangka kerja yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatur agar administrasi pertanahan dapat efektif dan kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi tantangan pemeliharaan sistem administrasi pertanahan dan solusi yang tersedia. Ruang lingkup dan ukuran dari masalah pemeliharaan administrasi pertanahan mempunyai beberapa solusi saja, oleh sebab itu diharapkan negara dapat mengidentifikasi masalah pemeliharaan administrasi pertanahan yang terjadi terus menerus dan mencari solusi yang paling tepat untuk diterapkan (Rohan Mark Bennett, Eva Maria Unger, Christiaan Lemmen and Paula Dijkstra, 2021). Untuk meningkatkan transparansi dari semua proses administrasi pertanahan dapat dieksplorasi potensi penggunaan teknologi blockchain (Prince Donkor Ameyaw and Walter Timo de Vries, 2020). Sistem administrasi pertanahan yang efektif dan efisien sangat penting dalam mengejar pembangunan nasional dan lokal karena menjamin keamanan kepemilikan tanah, memungkinkan warga untuk memanfaatkan tanah mereka, dan mendorong lingkungan yang damai dan stabil (Jovito Jose Katigbak, 2019).

Sistem administrasi pertanahan yang baik tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan dukungan data-data yang akurat di bidang pertanahan yang meliputi data fisik dan data yuridis dari sebidang tanah. Kegiatan untuk memperoleh dan memelihara data-data yang akurat tersebut dapat dilakukan melalui Pendaftaran Tanah. Fungsi utama dari Pendaftaran Tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan kepastian hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanahnya agar si pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak atas tanah yang sebenarnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis mencoba untuk membuat sebuah penelitian yang bersumberkan dari penelitian-penelitian mengenai Pendaftaran Tanah dan relasi/keterkaitannya dengan kepastian hak atas tanah atau keamanan kepemilikan hak atas tanah yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tujuan dilakukannya Pendaftaran Tanah?
2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pendudukan dan penguasaan hak atas tanah secara liar/ sengketa tanah?
3. Negara-negara mana saja yang dijadikan sebagai obyek penelitian tentang pendaftaran tanah yang terkait dengan keamanan kepemilikan hak atas tanah yang telah dilakukan?

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai keterkaitan antara pendaftaran tanah dan keamanan kepemilikan hak atas tanah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review*, dikarenakan pencarian literatur secara sistematis diakui sebagai komponen penting dari proses tinjauan sistematis yang bertujuan untuk memberikan laporan yang benar tentang identifikasi masalah yang ada (Chris Cooper, Andrew Booth, Jo Varley-Campbell, Nicky Britten and Ruth Garside, 2018).

Strategi Pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci “Land Registration” AND “Land Rights Security” . Penambangan data dilakukan pada bulan November dan Desember 2021.

Seleksi studi dilakukan dengan mengakses jurnal-jurnal internasional melalui Google Scholar, Taylor and Francis Online, Google Scholar dan Elsevier dengan hasil seleksi awal sebanyak 4.308 penelitian yang terdiri dari :

1. Google Scholar 3.900 penelitian;
2. Taylor and Francis Online 372 penelitian;
3. Elsevier 36 penelitian.

Hasil seleksi awal tersebut kemudian dibuatkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

Tabel 1.

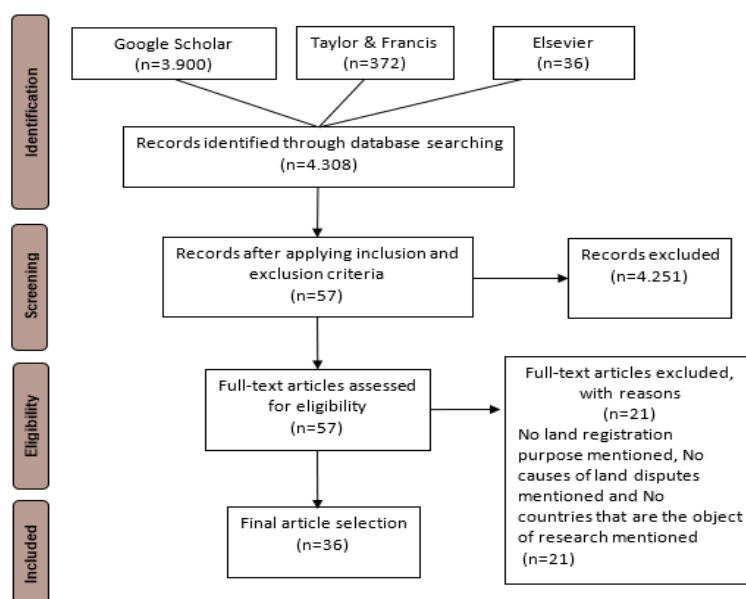
Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Karya penelitian terkait pendaftaran tanah dan keamanan kepemilikan hak atas tanah.	Karya penelitian tidak terkait dengan pendaftaran tanah dan keamanan kepemilikan hak atas tanah.
Artikel berbahasa Inggris.	Artikel yang ditulis dalam bahasa lain.
Artikel penelitian diterbitkan antara tahun 2016 dan 2021.	Artikel penelitian tidak diterbitkan antara tahun 2016 dan 2021.
Penelitian yang diterbitkan melalui jurnal internasional.	Prosiding, buku, book chapter, tesis, laporan singkat.
Akses terbuka.	Akses tertutup.

Artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi kemudian ditelaah untuk menguji pemenuhan terhadap kriteria kualitas pada Tabel 2 di bawah ini. Kriteria kualitas ditentukan untuk menjamin keterkaitan artikel dengan pertanyaan penelitian ini. Dari hasil penerapan kriteria kualitas didapatkan 36 artikel.

Tabel 2.

Kriteria Kualitas
Apakah tujuan dilakukannya pendaftaran tanah dinyatakan dengan jelas?
Apakah penyebab terjadinya pendudukan dan penguasaan hak atas tanah secara liar/ sengketa tanah ditentukan dengan jelas?
Apakah keterkaitan antara pendaftaran tanah dengan keamanan kepemilikan hak atas tanah disebutkan dengan jelas?
Apakah nama negara yang dijadikan obyek penelitian disebutkan dengan jelas?

Prosedur seleksi dapat dilihat melalui alur PRISMA di bawah ini.



Gambar 1. alur PRISMA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah tujuan dilakukannya Pendaftaran Tanah?

Berdasarkan hasil review dari penelitian-penelitian terdahulu, maka tujuan dilakukannya Pendaftaran Tanah adalah :

1. Memberikan keamanan terhadap hak atas tanah (Urcil Papito Kenfack Essougong and Sandrine Josephine Mahbou Tegua, 2018, Frank F. K. Byamugisha, 2021).
2. Memberikan kepastian hukum terhadap data-data pertanahan (Azis Djabbarudin, 2020).
3. Mengurangi terjadinya konflik pertanahan. Kebijakan pertanahan dan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan baik dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah (Raymond Talinbe Abdulai, 2016, James Mwangi, 2017, Raymond Talinbe Abdulai, Edward Ochieng, 2017).
4. Menambah investasi dan produktivitas dalam bidang pertanian (Stephen Lawry, Cyrus Samii, Ruth Hall, Aaron Leopold, Donna Hornby, Farai Mtero, 2016, Uwacu Alban Singirankabo and Maurits Willem Ertsen, 2020).
5. Mencatat penyertaan modal dalam perseroan terbatas yang berasal dari penggabungan dan pengambilalihan (Aslan Noor, Imas Rosidawati Wiradirja, Lilis Ratnaningsih, 2019).
6. Strategi pemberdayaan hukum yang memihak masyarakat miskin (Chatarine Boone, 2019, Daniel C. Miller, Pushendra Rana, Katia Nakamura, Samantha Irwin, Samantha H. Cheng, Sofia Ahlroth, Emilie Perge, 2021).
7. Agar dapat menjamin kesetaraan gender. Beberapa penelitian membahas penyebab dilakukannya pendaftaran tanah agar jumlah perempuan yang melakukan pensertipikatan tanah setara dengan jumlah laki-laki yang melakukan pensertipikatan tanah (Helle Munk Ravnborg, Rachel Spichiger, Rikke Brandt Broegaard, Rasmus Hundsbaek Pedersen, 2016, Ambe J. Njoh, Liora Bigon, Erick O. Anangac, Richard A. Ayuk-etang, 2018).

Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pendudukan dan penguasaan hak atas tanah secara liar/ sengketa tanah?

Penyebab terjadinya pendudukan dan penguasaan hak atas tanah secara liar/ sengketa tanah terdiri dari :

1. Konflik batas atau teritorial dan administrasi pertanahan yang buruk (Pramod K. Singh, Abhisek Nair, Jofri Issac, 2021).
2. Lembaga yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menghentikan praktek pendudukan dan penguasaan hak atas tanah secara liar tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan wewenangnya sering tumpang tindih (Paul Hebinck, 2021).
3. Tata Kelola Pertanahan yang berdasarkan pluralisme hukum dan desentralisasi mengakibatkan kebingungan dalam penyelesaian sengketa pertanahan (Doreen Nancy Kobusingye, Mathijs Van Leeuwen and Han Van Dijk, 2016).
4. Perebutan kekuasaan antara elit politik, eksploitasi sumber daya alam dan pengembangan agribisnis (Clara Mi Young Park, 2019, Yukari Sekine, 2021).
5. Sistem Pendaftaran Tanah yang masih manual, belum komputerisasi dan belum dilakukan secara elektronik (Yusri Zakariah, Salfarina Samsudin, Norshafadila Ngadiman, 2020).
6. Pindahan paksa penduduk asli dibawah kolonialisme dan penerapan apartheid (Joseph Mudau, Ricky M. Mukonza, Bhekabantu A. Ntshangase, 2018).

Negara-negara mana saja yang dijadikan sebagai obyek penelitian tentang pendaftaran tanah yang terkait dengan keamanan kepemilikan hak atas tanah yang telah dilakukan?

Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, negara-negara yang menjadi obyek dalam penelitian Pendaftaran Tanah yang terkait dengan keamanan kepemilikan hak atas tanah adalah sebagai berikut :

1. Mali, West Africa (Edmond Totin, Alcade Segnon, Carla Roncoli, Mary Thompson-Hall, Amadou Sidib, Edward R. Carrf, 2021).
2. Southern Kazakhstan and Eastern Uzbekistan, Central Asia (Zarema Akhmadiyeva, Thomas Herzfeld, 2021).
3. Cameroon, Central Africa (Ambe J. Njoh, Liora Bigon, Erick O. Anangac, Richard A. Ayuk-Etang, 2018, Urcil Papito Kenfack Essougong and Sandrine Josephine Mahbou Teguaia, 2018).
4. India, South Asia (Vinay Thakur, M.N. Doja, Yogesh K. Dwivedi, Tanvir Ahmad, Ganesh Khadanga, 2020, Melanie Vandenhelsken, 2020, Pramod K. Singh, Abhisek Nair, Jofri Issac, 2021, Bina Agarwal, Pervesh Anthwal and Malvika Mahesh, 2021).
5. Nigeria, West Africa (Tom Goodfellow and Olly Owen, 2020, Maman Issoufou, Oumarou Amadou, Dambo Lawali, Oumarou M. Saidou, Ibrahim Habibou and Yamba Boubacar, Michael Hardman, 2020).
6. Namibia, South Africa (Joseph Mudau, Ricky M. Mukonza, Bhekabantu A. Ntshangase, 2018, Paul Hebinck, 2021).
7. Uganda, East Africa (Doreen Nancy Kobusingye, Mathijs Van Leeuwen and Han Van Dijk, 2016, Samuel B. Mabikke, 2016, Moses Musinguzi, Stig Enemark, Simon Peter Mwesigye, 2021).
8. Cambodia, South East Asia (Clara Mi Young Park, 2019).
9. Myanmar, South East Asia (Yukari Sekine, 2021, Doi Ra, Sai Sam Kham, Mads Barbesgaard, Jennifer C. Franco and Pietje Vervest, 2021).
10. Kenya, East Africa (Alexander Sieber, 2019).
11. Somalia, East Africa (James Mwangi, 2017).
12. Sub Saharan Africa (Catherine Boone, 2019).
13. Ghana, West Africa (Richmond Antwi-Bediako, Robert Read, 2018, Zaid Abubakari, Christine Richter and Jaap Zevenbergen, 2020, Prince Donkor Ameyaw and Walter Timo de Vries, 2020).
14. Malaysia, South East Asia (Yusri Zakariah, Salfarina Samsudin, Norshafadila Ngadiman, 2020).
15. China, East Asia (Frank F. K. Byamugisha, 2021, Haoxuan Sa and Anne Haila, 2021).
16. Vietnam, South East Asia (Frank F. K. Byamugisha, 2021).
17. Philippines, South East Asia (Jovito Jose Katigbak, 2019).
18. Zimbabwe, South Africa (Joseph Mudau, Ricky M. Mukonza, Bhekabantu A. Ntshangase, 2018).
19. Indonesia, South East Asia (Adriaan Bedner, Yance Arizona, 2019, Azis Djabbardin, 2020).
20. Croatia (Josip Krizanovic, Doris Pivac, Hrvoje Tomic and Sinisa Mastelic-Ivic, 2021).
21. England (Josip Krizanovic, Doris Pivac, Hrvoje Tomic and Sinisa Mastelic-Ivic, 2021).
22. Green County and OHIO, USA (Josip Krizanovic, Doris Pivac, Hrvoje Tomic and Sinisa Mastelic-Ivic, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan jawaban dari permasalahan tersebut di atas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: a. Ada keterkaitan erat antara pendaftaran tanah dengan keamanan kepemilikan hak atas tanah. Sistem administrasi pertanahan yang baik dapat mencegah terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. b. Negara-negara yang dijadikan obyek dalam penelitian yang terkait pendaftaran tanah dengan keamanan kepemilikan hak atas tanah sebagian besar merupakan negara-negara yang rawan terjadinya konflik atau sengketa pertanahan. Sedangkan negara-negara lain yang dijadikan obyek dalam penelitian merupakan negara-negara berkembang yang sedang berusaha untuk melakukan

penyempurnaan kegiatan pendaftaran tanah untuk menuju sistem administrasi pertanahan yang baik.

REFERENSI

- [Adriaan Bedner](#), [Yance Arizona](#) (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20 (5), 416-434.
- Alexander Sieber (2019). Bi-polar development: A theoretical discursive commentary on land titling and cultural destruction in Kenya. *Cogent Social Sciences* 5 (1), 1674054.
- Ambe J. Njoh, Liora Bigon, Erick O. Anangac, Richard A. Ayuk-Etang (2018). Institutional, economic and socio-cultural factors accounting for genderbased inequalities in land title procurement in Cameroon. *Land Use Policy* 78, 116-125.
- Aslan Noor, Imas Rosidawati Wiradirja, Lilis Ratnaningsih (2019). A Critical Review of The Recording of Land Ownership Transfer in Order to Include Capital in The Limited Liability Company Derived From Mergers and Acquisitions. *International Journal of Arts and Social Science* Volume 2 Issue 5, September-Oktober 2019.
- Azis Djabbarudin (2020). Cadastral Surveyor in Land Registration System in Indonesia : A Current Development. *Journal of Law and Legal Reform* 1 (4), 705-722.
- [Bina Agarwal](#), [Pervesh Anthwal](#), and [Malvika Mahesh](#) (2021). How Many and Which Women Own Land in India? Inter-gender and Intra-gender Gaps. *The Journal of Development Studies*, 1-23.
- Catherine Boone (2019). Legal Empowerment of the Poor through Property Rights Reform: Tensions and Trade-offs of Land Registration and Titling in Sub-Saharan Africa. *The Journal of Development Studies*, 55 (3), 384-400.
- Chris Cooper, Andrew Booth, Jo Varley-Campbell, Nicky Britten and Ruth Garside (2018). Defining The Process to Literature Searching in Systematic reviews : A Literature Review Guidance and Supporting Studies. *BMC Medical Research Methodology* 18 (1), 1-14.
- Clara Mi Young Park (2019). "Our Lands are Our Lives": Gendered Experiences of Resistance to Land Grabbing in Rural Cambodia. *Feminist Economics* 25 (4), 21 - 44.
- Daniel C. Miller, Pushpendra Rana, Katia Nakamura, Samantha Irwin, Samantha H. Cheng, Sofia Ahlroth, Emilie Perge (2021). A global review of the impact of forest property rights interventions on poverty. *Global Environmental Change* 66, 102218.
- Doi Ra, Sai Sam Kham, Mads Barbesgaard, Jennifer C. Franco & Pietje Vervest (2021). The politics of Myanmar's agrarian transformation. *The Journal of Peasant Studies* 48 (3), 463-475.
- [Doreen Nancy Kobusingye](#), [Mathijs Van Leeuwen](#) & [Han Van Dijk](#) (2016). Where do I report my land dispute? The impact of institutional proliferation on land governance in post-conflict Northern Uganda. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 48 (2), 238-255.
- Edmond Totin, Alcade Segnon, Carla Roncoli, Mary Thompson-Hall, Amadou Sidib, Edward R. Carrf (2021). Property rights and wrongs: Land reforms for sustainable food production in rural Mali. *Land Use Policy* 109, 105610.
- [Frank F. K. Byamugisha](#) (2021). Experiences and Development Impacts of Securing Land Rights at Scale in Developing Countries: Case Studies of China and Vietnam. *Land* 10 (2), 176.
- [Haoxuan Sa](#) and [Anne Haila](#) (2021). Urban villagers as real estate developers: embracing property mind through 'planting' housing in North-east China. *Housing Studies*, 1-21.
- [Helle Munk Ravnborg](#), [Rachel Spichiger](#), [Rikke Brandt Broegaard](#), [Rasmus Hundsbæk Pedersen](#) (2016). Land Governance, Gender Equality and Development: Past Achievements and Remaining Challenges. *Journal of International Development* 28 (3), 412-427.

- James Mwangi (2017). A Synopsis For Formulation Of National Land Policy To Guide The Management And Administration Of Land: A Case For Somalia. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)* Volume 4 Issue 10.
- [Joseph Mudau](#), [Ricky M. Mukonza](#), [Bhekabantu A. Ntshangase](#) (2018). A comparative overview of land reform experiences in Zimbabwe, Namibia and South Africa : a lesson that South Africa can learn from. *Journal of Public Administration* 53 (2-1), 580-601.
- [Josip Križanović](#), [Doris Pivac](#), [Hrvoje Tomić](#) and [Siniša Mastelić-Ivić](#) (2021). Review of Land Administration Data Dissemination Practices: Case Study on Four Different Land Administration System Types. *Land* 10 (11), 1175.
- Jovito Jose Katigbak (2019). Upgrading the Land Administration System of the Philippines through ICT: A Review of the Land Titling Computerization Program. *Journal of eDemocracy and Open Government* 11 (1), 1-13.
- [Maman Issoufou](#), [Oumarou Amadou](#), [Dambo Lawali](#), [Oumarou M. Saidou](#), [Ibrahim Habibou](#) and [Yamba Boubacar](#)
- [Michael Hardman](#) (2020). Constraints and strategies for women's access to land in the regions of Maradi and Zinder (Niger). *Cogent Social Sciences* 6 (1), 1712156.
- [Moses Musunguzi](#), [Stig Enemark](#), [Simon Peter Mwesigye](#) (2021). Fit for Purpose Land Administration: Country Implementation Strategy for Addressing Uganda's Land Tenure Security Problems. *Land* 10 (6), 629.
- Paul Hebinck (2021). Land and grazing disputes and overlapping authorities in Namibia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1-11.
- [Pramod K. Singh](#), [Abhishek Nair](#), [Jofri Issac](#) (2021). Are Land Conflicts Documented Sufficiently in India? *International Journal of Rural Management*, 0973005221997591.
- [Prince Donkor Ameyaw](#) And [Walter Timo de Vries](#) (2020). Transparency of Land Administration and the Role of Blockchain Technology, a Four-Dimensional Framework Analysis from the Ghanaian Land Perspective. *Land* 9 (12), 491.
- [Raymond Talinbe Abdulai](#), [Edward Ochieng](#) (2017). Land registration and landownership security: An examination of the underpinning principles of registration. *Property Management* Volume 35 No. 1, 24 - 47.
- [Richmond Antwi-Bediako](#), [Robert Read](#) (2018). Chiefs and nexus of challenges in land deals: An insight into blame perspectives, exonerating chiefs during and after Jatropa investment in Ghana. *Cogent Social Sciences* 4 (1), 1456795.
- [Samuel B. Mabikke](#) (2016). Historical Continuum of Land Rights in Uganda: A Review of Land Tenure Systems and Approaches for Improving Tenure Security. *Journal of Land and Rural Studies* 4 (2), 153-171.
- Steven Lawry, Cyrus Samii, Ruth Hall, Aaron Leopold, Donna Hornby & Farai Mtero (2017). The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review. *Journal of Development Effectiveness* 9 (1), 61-81.
- [Tom Goodfellow](#) & [Olly Owen](#) (2020). Thick claims and thin rights: Taxation and the construction of analogue property rights in Lagos. *Economy and Society* 49 (3), 406-432.
- [Urcil Papito Kenfack Essougong](#) & [Sandrine Josephine Mahbou Teguia](#) (2018). How secure are land rights in Cameroon? A review of the evolution of land tenure system and its implications on tenure security and rural livelihoods. *GeoJournal* 84 (6), 1645-1656.
- [Uwacu Alban Singirankabo](#) and [Maurits Willem Ertsen](#) (2020). Relations between Land Tenure Security and Agricultural Productivity: Exploring the Effect of Land Registration. *Land* 9 (5), 138.

Vinay Thakur, M.N. Doja, Yogesh K. Dwivedi, Tanvir Ahmad, Ganesh Khadanga (2020).
Land records on Blockchain for implementation of Land Titling in India. International
Journal of Information Management, Volume 52, 101940.